

# The Asia Pacific

Journal of Management Studies

ISSN: 2407-6325

Vol. 4 | No.1

## PENGARUH EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

Rina Dwi Utami \* Karunia Julian\*\*

\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

\*\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

### Article Info

### Abstract

#### Keywords:

Evaluation of financial performance, The ratio Of decentralization,Regional dependency ratio

*The financial performance area needed to measure the ability of an area in managing their finances its territory. The purpose of this research isto find out the financial performance of local government by using some financial ratios,are among themis the ratio of degree of decentralization, the dependency ratio, the ratio of independence, the ratio of the effectiveness and efficiency, growth ratio.*

*This research was conducted the office of BAPENDA and the data used in quantitative data that is the realization of the report budget (LRA) and Target. The method is done in this study is to use quantitative descriptive methods to measure the financial performance.*

*Results of the study showed that the ratioof degrees decentralization belongs to low or less because it is at intervals <20% with the average ratio of 12%. Result the ratio of the dependency rate belongs to very high views of the average dependency rate of 67% that is to be at intervals area >50%, the ratio of low belongs to the independence once with an average ratio of 18%. The result of the average ratio of effectiveness of 102% because it is on intervals >100% who belongs into the criteria very effective and the ratio of efficiency get result into an average of 97% can be categorized into efficient criteria. The original income growth ratio of the area, the revenue growth, operating expenses growth, capital expenses growth entirely showed a positive growth.*

Area kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur kemampuan suatu area dalam mengelola keuangannya di wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, diantaranya adalah rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio independensi, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan.

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPENDA dan data yang digunakan dalam data kuantitatif yaitu realisasi anggaran laporan (LRA) dan Target. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi tergolong rendah atau kurang karena berada pada interval <20% dengan rasio rata-rata 12%. Hasil rasio tingkat ketergantungan milik sangat tinggi dilihat dari tingkat ketergantungan rata-rata 67%.

### Corresponding Author:

rinadwiutami.rina@gmail.com  
karuniajulian0@gmail.com

yaitu berada di daerah interval > 50%, rasio rendah milik kemerdekaan sekali dengan rasio rata-rata 18%. Hasil dari rata-rata rasio efektivitas 102% karena berada pada interval > 100% yang termasuk ke dalam kriteria sangat efektif dan rasio efisiensi mendapatkan hasil menjadi rata-rata 97% dapat dikategorikan ke dalam kriteria efisien. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan biaya operasi, pertumbuhan biaya modal sepenuhnya menunjukkan pertumbuhan positif.

## Pendahuluan

Kemandirian daerah merupakan implikasi dari otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana dari hasil pendapatan daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi di daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja

dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan dalam pembangunan, membantu dalam pengambilan keputusan serta otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, dan sebagai sumber pengukuran standar evaluasi kinerja. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Lebak diantaranya adalah : Ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat dari sudut anggaran rutin; Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dalam penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dana Transfer; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengefektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerahnya;

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah masih rendah meskipun mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata-rata pemerintahan daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Jika dilihat pada data Laporan Realisasai Anggaran Kabupaten Lebak, PAD kabupaten lebak tahun 2012 (dalam jutaan rupiah) sebesar Rp. 127,295,426,- terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 22,667,691,- Retribusi daerah sebesar Rp. 91,952,016,- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3,157,065,- Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 9,518,654- sedangkan Dana Perimbangan tahun 2012 sebesar Rp. 939,862,523- yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 69,278,880,- Dana alokasi umum sebesar Rp. 804,122,393,- serta Dana alokasi khusus sebesar Rp. 66,461,250,-. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Dana Perimbangan masih jauh lebih memdominasi dari PAD. Kesimpulannya Kabupaten Lebak cenderung masih menunjukkan ketergantungan dana dari luar atau dengan kata lain ketergantungan terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat masih relatif besar. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dana transfer. Meskipun PAD Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun seperti pada tahun 2015 sebesar Rp. 301,542,033 dan tahun 2016 sebesar Rp. 304,485,932,-. Akan tetapi Dana Perimbangan masih menjadi prioritas utama atau pendapatan daerah terbesar dibandingkan pendapatan daerah yang lain, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lebak masih tergolong rendah, karena masih bergantung pada kontribusi pemerintah pusat.

## **Kajian Pustaka**

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Pengertian kinerja seperti yang dikemukakan oleh Irham Fahmi (2011:2) Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan daerah menurut penelitian yang dilakukan oleh Julius Tamawiwy, Jullie dkk (2015), "Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan". Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (Siti Nur Rochmah,2015). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian suatu daerah dari hasil kerja dibidang keuangan dengan menggunakan beberapa indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah atau instansi dalam mengelola keuangan daerahnnya.

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo (2009:121) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial". Menurut Laporan OECD (1993) dalam Harun (2009:154) ada tiga kecenderungan utama dalam pengukuran kinerja pemerintah di

Negara-negara tersebut yang diawali reformasi akuntansi pemerintahan menuju rezim akrual: pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang mampu mengukur dan membandingkan aktivitas yang sama baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, adanya usaha pengukuran kepuasan pelanggan (masyarakat) seperti *Citizen surveys; output* sebagai indikator, jumlah pengaduan; dikembangkannya ukuran-ukuran keberhasilan yang bersifat jangka panjang dari suatu program.

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010:158) Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem atau alat untuk mengevaluasi kinerja terhadap pencapaian atau keberhasilan organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan output, hasil, manfaat dan dampak terhadap masyarakat sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

### Rasio Keuangan Daerah

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu

dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. sebagai berikut :

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Mahmudi, 2016:140) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. (Mahmudi, 2016:140) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah

##### 1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD

dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan PAD

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

Realisasi Belanja Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut mahmudi (2012:137) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*Trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (*t*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Th *t* - Th (*t*-1)

$$\frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

Pendapatan Th (*t*-1)

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk analisis data digunakan analisis sebagai berikut :

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. sebagai berikut :

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

### 2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

### 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut mahmudi (2012:137) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*Trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan

yang negative maka hal itu menunjukan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif dengan tingkat persentase pada tahun 2012 mencapai 10% dan mengalami penurunan sekitar 1% pada tahun 2013 yaitu sebesar 9%. Namun pada tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan  $\pm$  5% dengan menunjukan hasil rasio sebesar 14%. Kemudian ditahun-tahun berikutnya yang bersangkutan terus mengalami penurunan sebesar 13% dan 12%. Hal ini menunjukan bahwa kontribusi PAD terhadap pembangunan daerah Kabupaten Lebak masih tergolong rendah artinya masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat. Secara keseluruhan hasil rata-rata tingkat rasio derajat desentralisasi Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2012-2016 sebesar 12% sehingga jika diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi, maka Kabupaten Lebak termasuk kedalam kriteria **Kurang** yang artinya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari total Pendapatan Daerah masih kurang.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan dari tabel diatas menunjukan bahwa Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar 73%, mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 74%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan selisih  $\pm$  sekitar 9% yaitu sebesar 65% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 59%, tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar 65%. Angka ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dinilai masih sangat tinggi pada pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan

keuangan daerah Kabupaten Lebak dinilai masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, dan secara nominal setiap tahunnya terjadi kenaikan pendapatan transfer, tetapi secara presentasi terjadi penurunan setiap tahunnya terbukti pada tahun 2015 mengalami penurunan sampai 59% dibandingkan hasil rasio dari tahun-tahun sebelumnya.

Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan dareah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2012-2016 sebesar 67%. Apabila diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah termasuk kedalam kriteria **Sangat Tinggi** yang artinya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli daerah maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah sehingga masih bergantung terhadap subsidi dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten lebak pada tahun anggaran 2012 sebesar 14%, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 12%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang masing-masing sebesar 21% dan 23 % dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 19%. Hal ini menunjukan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Terlihat dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah baik dalam pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Lebak tahun anggaran 2012-2016 sebesar 18%. Jika diklasifikasikan menurut Pola hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan daerahnya termasuk ke dalam kriteria **Rendah sekali** dengan pola hubungan **Instruktif** artinya

peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

Berdasarkan Hasil Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Lebak mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya seperti pada tahun 2012 rasio efektifitas PAD mencapai persentase sebesar 102% sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 93% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sebesar 107% dan tahun 2015 sebesar 114%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 95%. Dari data perolehan tersebut meskipun mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif namun menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat merealisasikan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya. Hasil rata-rata rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2012-2016 sebesar 102%. Apabila diklasifikasikan ke dalam Kriteria efektivitas keuangan daerah maka tergolong **Sangat Efektif** dikarenakan berada pada interval  $>100\%$ . Artinya Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk merealisasikan pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lai-lain PAD yang sah sangat efektif karena sesuai dengan yang ditargetkan.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2012 sebesar 99%, tahun 2013 sebesar 103%, tahun 2014 sebesar 96%, tahun 2015 sebesar 94%, tahun 2016 sebesar 98%. Jika dilihat pada perhitungan rasio tersebut pada tahun 2013 tergolong tidak efisien karena berada pada interval  $>100\%$  yang artinya adanya penurunan kinerja dari pemeritah karena total belanja yang dikeluarkan melebihi total pendapatan daerah. Tetapi pada tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016 angka rasio tersebut berada pada interval  $<100\%$  yang artinya pemerintah daerah efisen dalam mengelola belanja daerahnya. Rata-rata yang diperoleh dari hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebesar 98%. Jika

dikategorikan kedalam Kriteria Efisiensi Penilaian Kinerja Keuangan termasuk kedalam kriteria **Efisien**. Yang artinya Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya dalam melakukan pengelolaan belanja daerahnya.

Dari perhitungan rasio dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2012-2016 Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan daerah, pertumbuhan belanja operasi, pertumbuhan belanja modal seluruhnya menunjukan pertumbuhan yang positif. Artinya Kinerja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lebak mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya cenderung positif tetapi Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat meminimalisir ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ke empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bisma, I. D. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Fakultas Ekonomi Vol. 4 No. 3*, 3-5.
- Deddi Nordiawan, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Putu Miartana, I. M. (2016). Evaluasi Kinerja Rasio-Rasio Keuangan Daerah Di Provinsi Bali (2010-2014). *Jurnal*

- Manajemen & Bisnis Volume 13, 15-27.*
- Kabupaten Lebak.* (2017). Retrieved Agustus 17, 2017, from Lebakkab.go.id: <http://www.lebakkab.go.id>
- Julius Tamawiwy, J. J. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadya, J., & Inggriani. (2014). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado . *Jurnal Fakultas Ekonomi & Bisnis Vol. 2*, 1-11.
- Ni Ketut Erna Rahmawati, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 15*, 8.
- Noor, D. J. (2011). *Metodologi Penelitian .* Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Dasar RI No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Undang-Undang Dasar RI No. 23 Tahun 2014.
- Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis*, 6.
- Sari, N. C. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 22.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilowati, M. (2012). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali) . *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 4.
- Tunggal, A. (2013). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8.
- Usman. (2010). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 3.